

# JIWASRAYA, ASABRI, DAN REFORMASI IKNB

Oleh : Tim Riset Majalah Stabilitas LPPI

Dunia keuangan Indonesia seakan tidak pernah sepi dari skandal. Yang kini tengah mengepul adalah skandal Jiwasraya dan Asabri. Keduanya bersimpul pada rasionalitas investasi yang kurang diperhatikan sehingga termakan oleh iming-iming keuntungan yang tinggi. Jiwasraya bermula dengan produk JS Saving Plan yang menawarkan return investasi tinggi. Juga dengan strategi penempatan dana pada saham gorengan yang berujung pada kerugian investasi. Untuk kasus Asabri, permulaan masalah punya kemiripan dengan yang kedua.

***Kasus gagal bayar yang menyeret setidaknya dua perusahaan asuransi negara memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan otoritas.***

Akan tetapi, imbas dari masalah itu memiliki perbedaan di antara dua perusahaan asuransi milik negara itu. Meski penyebab kasus hampir sama, perbedaan spesifikasi kasus terletak pada sifat bisnis kedua lembaga asuransi tersebut yakni Asabri sebagai asuransi sosial sedangkan Jiwasraya merupakan asuransi komersial. Episentrumnya pun berbeda, Jiwasraya nasabah umum sedangkan Asabri adalah Prajurit TNI/Polri serta PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan.

## **Kemelut Jiwasraya**

Aroma tidak sedap pada tubuh PT Asuransi Jiwasraya mulai terendus “kembali” pada 10 Oktober 2018. Kala itu Jiwasraya mengumumkan keterlambatan pembayaran klaim polis sebesar Rp 802 miliar kepada 711 nasabah pemegang produk JS Saving Plan. Setelah geger gagal bayar oleh BUMN Asuransi berusia 160 tahun itu, Menteri BUMN saat itu Rini Soemarno pun langsung melaporkan dugaan penipuan (fraud) PT Asuransi Jiwasraya kepada Kejaksaan Agung. Dalam laporan bertanggal 17 Oktober 2019, Rini menyampaikan ada dugaan penyalahgunaan investasi yang melibatkan 13 perusahaan sehingga menyebabkan potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp13,7 triliun (per Agustus 2019).

Malapetaka bermula ketika sejak tahun 2015 Jiwasraya meluncurkan produk JS Saving Plan dengan return 9-13 persen, jauh di atas bunga deposito (FY2018 sebesar 5,2 -7 persen), obligasi (FY2018 sebesar 8-9,5 persen), dan bahkan pertumbuhan indeks saham sepanjang tahun 2018 adalah minus 2,3 persen.

Produk JS Saving Plan sendiri merupakan produk asuransi jiwa sekaligus investasi yang ditawarkan melalui perbankan atau bancassurance. Berbeda dengan produk asuransi unit link yang risiko investasinya ditanggung pemegang polis, JS Saving merupakan investasi non unit link yang risikonya sepenuhnya ditanggung perusahaan asuransi. Dengan iming-iming jaminan



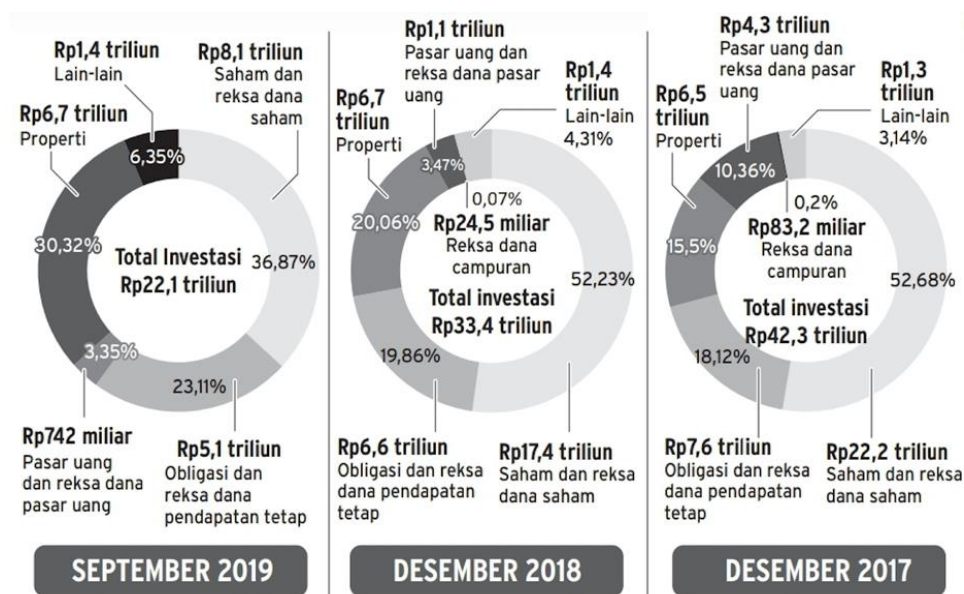
## Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

return tinggi akhirnya selama produk JS Saving Plan dijual pada periode 2015-2018, terkumpul dana segar mencapai Rp 53,27 triliun dari total 17.403 nasabah.

Celaknya, dari dana jumbo yang berhasil dikumpulkan, banyak portofolio investasi Jiwasraya yang justru ditaruh di aset-aset dengan risiko sangat tinggi. Sebut saja reksadana sebesar Rp 14,9 triliun atau 59 persen dari total dana investasi. Sayangnya lagi hampir 95 persen di antaranya dipercayakan ke perusahaan manajer investasi berkinerja rendah, hanya 2 persen saja yang dikelola top tier manajer investasi.

Investasi terbesar kedua dialokasikan ke saham dengan nilai Rp5,7 triliun atau 22,4 persen dari total dana investasi. Parahnya, 95 persen di antaranya ditempatkan pada saham-saham berkinerja buruk, atau hanya 5 persen yang berada pada saham LQ45.

**Gambar 1 – Komposisi Investasi Jiwasraya**



Sumber : PT. Jiwasraya

Penempatan investasi yang sembrono tersebut diperparah dengan minimnya penerapan manajemen portofolio yang semestinya menjadi guideline atau panduan sebagai batasan maksimum pada high risk asset. Akibatnya, aset investasi justru terkonsentrasi pada produk investasi yang tidak likuid (tidak dapat diperjualbelikan segera).

Selain itu, tata kelola perusahaan yang buruk juga tercermin dari massifnya kegiatan jual-beli saham dengan dressing reksadana. Modusnya, saham yang overprice dibeli oleh Jiwasraya lalu dijual pada harga negosiasi (di atas harga perolehan) kepada Manajer Investasi, untuk kemudian dibeli kembali oleh Jiwasraya. Modus ini diperkuat dengan aset investasi Jiwasraya yang dominan pada saham dan reksadana saham yang underlying asset-nya sama dengan portofolio saham langsung.



## Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

Akibat kesalahan penempatan dana investasi tersebut berujung fatal yaitu tidak hanya gagal bayar terhadap klaim yang jatuh tempo, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan nasabah. Walhasil penjualan produk Saving Plan pun terhenti. Situasi semakin memburuk karena lapserate (claim) secara drastis meningkat ke level 51 persen hingga 85 persen sehingga mengakibatkan tekanan likuiditas pada Jiwasraya.

Tekanan likuiditas tersebut tercermin dari ekuitas perusahaan yang negatif sebesar Rp23,9 triliun (September 2019), jauh menyusut dari posisi ekuitas tahun 2017 yang masih positif sebesar Rp 5,57 triliun. Bahkan rasio solvabilitas (RiskBased Capital/RBC) Jiwasraya pun sudah menyentuh level -805 persen (September 2019), jauh dibawah batas ketentuan OJK yaitu minimal 120 persen. Dengan kondisi itu, agar Jiwasraya dapat memompa RBC di atas 120 persen dibutuhkan dana hingga Rp32,89 triliun.

Nasi sudah menjadi bubur, gagal bayar Jiwasraya terhadap klaim pemegang polis pun terus menggunung menjadi Rp12,4 triliun per Desember 2019. Akibat ketidakmampuan perusahaan membayar polis jatuh tempo, diprediksi akumulasi tunggakan bisa mencapai Rp16,3 triliun hingga akhir tahun 2020. Nasabah pun sudah ditawari skema roll over atau perpanjangan kontrak produk JS Saving Plan.

Hasilnya, 33 persen pemegang polis produk JS Saving Plan menyatakan minat tawaran program roll over tersebut, dengan imbalan bunga dibayar di muka sebesar 7 persen per tahun. Sementara bagi nasabah yang tidak ingin menerima skema rollover maka manajemen Jiwasraya menjanjikan pemberian bunga pengembangan efektif sebesar 5,75 persen per tahun net. Bahkan, Kementerian BUMN pun berani menjanjikan dimulainya cicilan pembayaran tunggakan Jiwasraya per triwulan kedua tahun ini.

### **Polemik Asabri**

Sementara itu mencuatnya isu skandal Asabri diawali dengan pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD yang menyatakan terdapat potensi kerugian Asabri sebesar Rp10 triliun. Penyebab utama kerugian tersebut adalah harga saham-saham yang menjadi portofolio Asabri berguguran sepanjang 2019.

Sepanjang 2019, kinerja saham ke empat belas perusahaan tersebut menunjukkan kinerja yang tidak bagus dengan memberikan return negatif dan tiga di antaranya memberikan return 0 persen yakni saham PT Bank Yudha Bakti, PT Hanson Internasional, dan PT Sidomulyo Selaras. Porsi terbesar kepemilikan saham Asabri ada di PT Prima Cakrawala Abadi yang bergerak di bidang basic industry dan chemical dengan porsi kepemilikan sebesar 25,1 persen. Sepanjang 2019, memberikan return investasi -79,44 persen.

Kemudian kinerja terburuk terjadi pada saham PT Pool Asuransi Indonesia dimana return sahamnya menorehkan kinerja -96,63 persen dengan porsi kepemilikan saham sebesar 7,6



## Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

persen. Porsi kepemilikan saham terkecil Asabri ada di PT Island Concept Indonesia sebesar - 5,02 persen dengan return saham -30,61 persen.

### Portofolio Kepemilikan Saham PT. Asabri

Nama Emiten Saham	Porsi	Return 2019	Bidang Usaha
PT. Bank Yudha Bakti	20,13 %	0	Perbankan
PT Alfa Energi Investama	23,6 %	-95,7 %	Perdagangan, pengangkutan, dan pertambangan batubara melalui entitas anak perusahaan
PT Hartadinata Abadi	5,26 %	-32,82 %	industri manufaktur dan perdagangan perhiasan emas
PT Island Concepts Indonesia	5,02 %	-30,61 %	Hotel and Tourism
PT Inti Agri Resources	11,58 %	-79,17 %	Penangkaran Ikan
PT Indofarma	13,9 %	-86,62 %	Industri Farmasi dan Kesehatan
PT Hanson International	5,4 %	0 %	Investasi
PT Pelat Timah Nusantara	10,3 %	-81,25 %	Metal and Allied Products
PT Prima Cakrawala Abadi	25,1 %	-79,44 %	Basic Industry And Chemicals
PT Pool Advista Finance	7,6 %	-88,09 %	Pembiayaan
PT Pool Asuransi Indonesia	7,4 %	-96,63 %	Investasi
PT PP Properti	5,3 %	-41,28 %	Real Estate
PT Sidomulyo Selaras	18,06 %	0 %	Jasa Transportasi darat khusus Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
PT SMR Utama	6,6 %	-92,31 %	Pertambangan Batu Mangan melalui anak perusahaan

Sumber : Riset Stabilitas

Terjadi kejanggalan dalam penurunan kinerja saham yang dipegang oleh Asabri. Kejanggalan tersebut terlihat dari penurunan nilai saham yang dimiliki Asabri yang terjadi secara individual perusahaan, tidak terjadi pada emiten/perusahaan lain yang berada di sektor sejenis. Hal ini memunculkan hipotesis bahwa saham-saham yang dimiliki Asabri sulit untuk recovery (naik harganya) sampai level tertinggi. Palsunya kenaikan harga saham sebelumnya terjadi secara irasional, tidak berdasarkan fundamental perusahaan.

Asabri bisa jadi lebih beruntung dibandingkan dengan Jiwasraya. Keberuntungan ini didasari pada sifat asuransi Asabri yang merupakan asuransi sosial. Sifat asuransi sosial Asabri memungkinkan Asabri memiliki cashflow yang terjaga dengan adanya iuran wajib dari anggotanya setiap bulan. Hal tersebut menjadi penyelamat sementara meski Risk Base Capital (RBC) jauh di bawah ketentuan OJK.



## Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

Dalam laporan keuangan terakhir Asabri tahun 2017, tercatat bahwa Rasio Solvabilitas (Risk Base Capital/RBC) Asabri hanya 62,35 persen (di bawah ketentuan OJK minimal RBC 120 persen), bahkan RBC Asabri tahun 2016 negatif hingga -54,73 persen. Rasio Solvabilitas adalah pengukuran tingkat keamanan finansial atau kesehatan suatu perusahaan asuransi. Semakin besar rasio solvabilitas sebuah perusahaan asuransi, maka semakin sehat kondisi finansial perusahaan tersebut.

Selanjutnya, nilai aset Asabri tercatat senilai Rp44,80 triliun (2017), naik dari tahun 2016 sebesar Rp36,5 triliun. Nilai kewajiban (liabilitas) sebesar Rp43,62 triliun (2017) dan Rp36,4 triliun (2016). Sedangkan utang Asabri meningkat sebesar 291 persen dari Rp 412 miliar (2016) menjadi Rp1,61 triliun (2017). Satu hal yang membuat kasus Asabri tidak seperti Jiwasraya adalah adanya akumulasi iuran pensiun Asabri sebesar Rp25,68 triliun (2017) dengan pendapatan premi Asabri sebesar Rp1,39 triliun (2017), meningkat 0,01 triliun jika dibandingkan 2016.

Dari sisi pendapatan, pendapatan Asabriturun dari Rp 5,07 triliun di 2016 menjadi Rp 4,52 triliun (2017). Meski terjadi penurunan pendapatan, laba bersih tahun berjalan (profit) meningkat di 2017. Pada tahun 2016, laba bersih Asabri sebesar Rp 116,46 miliar meningkat menjadi Rp 943,81 miliar di 2017. Arus Kas Bersih dari aktivitas operasi meningkat menjadi Rp495,7 miliar (2017) dari posisi Rp122,9 miliar di tahun 2016.

Melihat kondisi perkembangan keuangan 2017 tersebut dan adanya iuran premi wajib tiap bulan yang diterima Asabri, menjadikan kasus Asabri tidak seberat Jiwasraya. Namun demikian, hal tersebut perlu ditelisik lebih lanjut dengan melihat laporan keuangan 2018 dan 2019 (sementara).

### Perbandingan Kasus Asuransi Jiwasraya dan Asabri

Variabel	Jiwasraya	Asabri
Jenis Asuransi	Komersial	Sosial
Potensi Kerugian	Rp 27 triliun	Rp10 triliun
Status Badan Hukum	BUMN	BUMN

### LANGKAH KE DEPAN

Berkaca pada persoalan pelik yang menghantui industri asuransi nasional maka hal yang paling urgen dilakukan saat ini adalah dilakukannya reformasi industri asuransi. Reformasi Industri Keuangan Non Bank (IKNB) merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan industri yang sehat dan memulihkan kepercayaan masyarakat. Hal pertama yang penting direformasi tentunya pada aspek pengaturan dan pengawasan. Mencuatnya kasus Jiwasraya dan Asabri secara langsung menyeret kinerja pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bahkan tidak sedikit pihak yang menyalahkan lemahnya fungsi pengawasan OJK.



## Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

Upaya memperkuat fungsi OJK tercermin dengan kemampuan menegakkan regulasi yang sudah ada seperti penilaian aktiva dan peningkatan modal minimum entitas perusahaan. Tidak kalah penting juga langkah OJK mendorong penguatan pengawasan berbasis risiko. Bahkan membenahan sistem informasi dan pelaporan industri kepada OJK juga harus dibarengi dengan transparansi dan akuntabilitas informasi terhadap publik.

Selain itu, reformasi IKNB juga mesti tercermin dengan perwujudan Lembaga Penjamin Polis. Berbeda dengan nasabah di sektor perbankan yang mendapatkan jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), nasabah di industri asuransi hingga saat ini masih belum mendapatkan jaminan keamanan sehingga kasus gagal bayar seperti Jiwasraya sangat merugikan nasabah.

Sementara dari sisi pemerintah, preseden buruk tata kelola BUMN yang mendera Jiwasraya dan Asabri harus menjadi pelajaran berharga untuk juga mereformasi BUMN. Persoalan pada kedua BUMN tersebut harus dijadikan sebagai momentum bersih-bersih BUMN dengan segera melakukan diagnosa menyeluruh terhadap semua BUMN. Jangan sampai terulang kembali perilaku investasi menyimpang yang dilakukan oleh Manajemen pada BUMN lainnya.

Pemerintah juga berkewajiban menjamin kembalinya dana nasabah Jiwasraya. Berbagai opsi pemulihan Jiwasraya seperti pembentukan anak usaha Jiwasraya maupun holding BUMN asuransi harus didasari dengan kajian yang mendalam dan tidak menimbulkan persoalan baru. Ringkasnya, penyelesaian masalah Jiwasraya jangan sampai membawa tumbal terhadap kesehatan BUMN yang lain.

File ini dapat diunduh melalui : <http://lppi.or.id/produk/riset/>

Untuk korespondensi dan informasi lebih lanjut, hubungi :

**Divisi Riset, Pengembangan Program dan Fakultas (DRPF)**

Telp: (021) 71790919 ext. 393 | Email: [riset@lppi.or.id](mailto:riset@lppi.or.id)

Website : [www.lppi.or.id](http://www.lppi.or.id)

**Disclaimer:** Tidak ada satu bagian pun dalam publikasi ini yang ditujukan sebagai promosi, penawaran, rekomendasi, nasihat investasi, atau untuk membentuk dasar keputusan-keputusan strategis atas suatu kegiatan, produk, dan/atau jasa dari pihak manapun. Oleh karena itu, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap keputusan pihak manapun.

